

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Kelapa Gading Permai.

Yustinus Farid Setyobudi, “Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”. 2013

Abisin,said zainal 2006, kebijakan publik, jakarta:suara bebas qomarudin (2012).badan hukum publik badan penyelenggara jaminan sosial

Qomaruddin. (2012). Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Transformasinya Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jurnal Legilasi Indonesia, 9(2).

Syarifah Dewi Handayani dan Febri Yuliani tentang “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Daerah”.2013 H.

Mu'min Ma'ruf(2014) yang berjudul tentang” “Implementasi agunan Kesehatan wilayah (Jamkesda) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta Febri dwi andyani (2020) yang berjudul”implentasi kebijakan pubilk tentang kartu sehat Bekasi tahun 2017 dan 2018.

Basuki Rahmat (2020) tentang “Dampak Implementasi Kebijakan agunan Kesehatan wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi masyarakat Miskin di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Syukron

Sazly dan Himawan Pratama(2020) yang berjudul tentang” Implementasi Aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu) Dalam Pelayanan Kepesertaan Jamkesda di Kelurahan Duri Pulo Jakarta Pusat.

Kamal Alamsyah, Ellya Niken Prastiwi, Ummu Salamah (2021) tentang “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi”.

Sari, D. (2021). Evaluasi Program Jamkesda di Bekasi: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(1), 45-57.

Rahman, A. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Kota Bekasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 123-135.

Elvine Ivana Kabuhung(2022)yang berjudul tentang” evaluasi ketiadaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) terhadap rujukan.

elviasiskhasari dan aldri frinaldy (2023) yang berjudul Tentang “Analisis Komparatif Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang.

Jurnal :

Jurnal:<https://www.suarakarya.id/nasional/26011637635/antusiasme-wargakota-bekasi-gunakan-programkartu-sehat-berbasis-nik> 2022a. “BPJS Kesehatan Berberkan Inovasi Unggulan Program JKN.”

BPJS Kesehatan. 2022. 39
<https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2329/BPJSKesehatan-Unveils-TheInnovationsof-JKN-Program>

<https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/556912-pengantar-ilmu-pemerintahan73ccc272.pdf> <https://bekasikota.go.id/detail/kartu-sehat-berbasis-nik-kota-bekasi-dalam-mendukung-jaminankesehatan-nasiona>

Dokumen lain

undang-undang no 32 tahun 2004 tentang sistem jaminan kesehatan (sjsn) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Republik Indonesia. 2009.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Peraturan walikota bekasi no 115 tahun 2016 tentang pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan daerah bagi keluarga tidak mampu berbasis kartu keluarga dan Nomer induk kependudukan.

peraturan walikota bekasi nomer 27 A tahun 2017 tentang penyelenggara program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomer induk kependudukan dikota bekasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, (2020).